

PROSPEK DAN HAMBATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) NASIONAL

Supomo

ABSTRACT

It is the fact that textile industry and textile products are labour intensive. These two sectors become the second rank in contributing foreign exchange after petroleum and LNG (Liquid Natural Gas) due to the eksport to the United States and other European countries. While the sectors used to be the best ones in industry, now they are facing two major problems. The first is international competition against Cina and India. The second problems are investment condition, high cost economy, and banking. The government is summoned to revive the dying sectors through clean and concrete programs which in return will reduce the rate of unemployment.

Keywords : power supply, competitiveness, investment environment, politics willingness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu masalah nasional yang harus segera diatasi Bangsa Indonesia saat ini sebagai kondisi obyektif adalah jumlah pengangguran yang semakin bertambah dalam masyarakat yang mencapai 40 juta orang, terdiri dari 10 juta orang pengangguran terbuka dan 30 juta orang pengangguran tidak kentara (Rangkuman Pertemuan Presiden dengan menteri-menterinya, 2-7-2006). Hal ini terutama disebabkan oleh karena : (1) Sektor riil sejak krisis ekonomi hingga kini belum berkembang normal

kembali. Sehingga dengan pemutusan hubungan kerja pada saat krisis ekonomi 1997 ditambah dengan penambahan angkatan kerja setiap tahun terhitung sejak tahun 1998, jumlah pengangguran saat ini semakin besar ; (2) Dalam era perdagangan bebas, Iptek merupakan kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian lembaga internasional, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang kandungan teknologi barang ekspor rendah,

sehingga daya saingnya sangat rendah dibandingkan negara lain di tingkat Asia Tenggara sekalipun.

Sektor riil khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menggunakan bahan baku hampir 90% dari impor dan mesin produksi seluruhnya juga dari impor, pada krisis ekonomi 1997/98 juga mengalami stagnasi. Hingga kini masih belum bisa berkembang normal seperti tahun-tahun sebelum krisis ekonomi.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang pernah menjadi industri primadona karena jumlah eksportnya

paling besar dibandingkan ekspor komoditas lain atau nomor dua setelah ekspor minyak bumi, saat ini turun perannya digantikan oleh produk elektronika dan hasil perkebunan. Padahal selama ini industri TPT termasuk industri padat tenaga kerja. Dalam situasi pengangguran yang semakin bertambah dalam masyarakat saat ini, industri padat tenaga kerja seperti halnya industri TPT sangat diperlukan dalam masyarakat luas. Keberadaan dan perkembangan industri TPT ini dengan demikian sudah seharusnya perlu dipertahankan atau direvitalisasi oleh pemerintah sehingga menjadi bertahan kembali seperti posisi semula sebelum krisis ekonomi, karena industri TPT selama ini menjadi sumber devisa negara dan penyerap tenaga kerja di samping mampu sebagai pusat pertumbuhan di wilayah di mana lokasi industri itu berada.

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah : (a) menganalisis akar permasalahan yang dihadapi sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), (b). Mengkaji kebijakan pengembangan

industri TPT untuk meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri.

PEMBAHASAN KONDISI, PROSPEK DAN HAMBATAN INDUSTRI TPT NASIONAL

Kondisi Industri TPT Nasional saat ini

Jumlah industri TPT menengah ke atas yang merupakan sektor formal hingga tahun 2003 sebanyak 2.654 perusahaan, dengan total investasi kumulatif sebesar Rp.132,- triliun. Jumlah ini tidak termasuk industri TPT kecil dan mikro berskala rumah tangga yang bersifat sektor informal yang kebanyakan pada sub-sektor garmen (Tanudjaja, 2004).

Industri TPT di samping menyerap banyak tenaga kerja dalam masyarakat, industri ini juga merupakan tulang punggung penghasil sumber devisa negara, yaitu terbesar kedua setelah migas, dibandingkan dengan nilai ekspor sektor lain. Jumlah volume produksi TPT nasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Jumlah produksi dari tahun ke tahun meningkat. Serat sintetis, khususnya, meningkat sebesar 6,6 % dari tahun 1999 sampai 2004, tetapi untuk produk benang turun 5,1 %, produk tekstil kasar turun 2,2 % dan garmen turun sebesar 3,4 %. Peningkatan produksi serat sintetis diakibatkan oleh tersedianya bahan baku untuk pembuatan serat polyester dan rayon (Tabel 1).

Ekspor produk TPT Indonesia lebih banyak ditujukan ke negara AS, Uni Eropa, dan Kanada. Hingga awal tahun 2005, ekspor produk TPT Indonesia masih mendapatkan kuota dari negara-negara tersebut. Dengan berakhirnya batas waktu kuota, mengakibatkan industri TPT berorientasi ekspor tetapi tidak efisien dan mutu produknya tidak bagus. Kondisi ini, secara alami akan menyebabkan industri TPT kalah bersaing dengan produk dari negara-negara pesaing yang dibantu oleh pemerintahnya. Saat ini, kebijakan pemerintah RI dianggap tidak mendukung perkembangan industri TPT nasional, kondisi iklim investasi

di Indonesia yang tidak menguntungkan bagi investor daripada negara-negara lain.

Nilai ekspor industri TPT sejak tahun 2001 hingga tahun 2002 mengalami penurunan. Pada tahun 2003 mulai naik kembali yang ditunjukkan dalam Tabel 2. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume ekspor produk TPT Indonesia pada periode Januari-Februari 2005 meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2004 yaitu dari 167.000 ton menjadi 179.000 ton. Pertambahan volume ekspor 12.000 ton itu telah mengakibatkan kenaikan nilai ekspor yang cukup signifikan yaitu 40,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2004, yaitu US\$. 958 juta menjadi US\$. 1,34 miliar.

Dalam empat tahun terakhir karena banyak saingan dari produk negara pesaing dan membanjirnya produk tekstil dari Cina di pasaran dalam negeri, maka industri TPT dalam negeri banyak mengalami persaingan. Industri TPT Cina, Vietnam, dan India juga cenderung menguasai pasar di pasar Amerika dan negara-negara Uni Eropa. Aki-

batnya periode tahun 2001 s/d 2003 produksi TPT Nasional berturut-turut hanya menggunakan 85,41%, 69,08%, 72,42% dari kapasitas mesin terpasang ("Rencana Pengembangan Industri TPT Hingga 2010", 2004).

Aspek Teknologi industri TPT di Indonesia

Industri TPT di Indonesia di samping menggunakan seluruh mesin produksi buatan luar negeri, juga menggunakan bahan baku dan bahan penolong hampir 90% impor dari luar negeri. Meskipun demikian karena pengalaman historis para pengusaha industri TPT dan keterampilan tenaga kerja yang hingga tahun 1997 yang lalu termasuk murah dan tidak banyak gejolak di bidang ketenagakerjaan, hingga kini keberadaan industri ini masih mampu bertahan.

Saat ini kondisi permesinan produksi industri TPT sangat menyedihkan karena seharusnya diperlukan restrukturisasi agar secara teknis mampu bersaing dengan industri TPT negara pesaing, tetapi tidak ada

bantuan kredit dari bank umum nasional, karena industri TPT dianggap industri beresiko tinggi. Dari total 226.000 *loom* yang ada di Indonesia, hanya 13% yang sudah menggunakan teknologi modern dan mampu memproduksi kain mentah lembaran yang bisa bersaing. Sisanya 87% masih menggunakan teknologi lama dan hanya mampu memproduksi kain kualitas A sebesar 22%, kualitas B 30%, dan sisanya kualitas C. Faktor penyebabnya adalah umur mesin lebih dari 15 tahun, ketinggalan teknologi dan biaya produksi tinggi. Mesin teknologi modern mampu memproduksi kain kualitas A sebesar 85%, pada hal besarnya biaya produksi kurang lebih sama dengan mesin teknologi lama yang hanya mampu memproduksi kain kualitas A sebesar 22%. Harga jual kain kualitas A 15% lebih tinggi dibandingkan kain kualitas B.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri TPT ini hingga tahun 2003 berjumlah 1.182.870 orang, tidak termasuk penyerapan tenaga kerja di sub-sektor garmen atau konveksi

skala kecil dan skala rumah tangga yang bersifat informal dan sulit untuk didata (Tanudjaja, 2004). Mesin-mesin produksi yang digunakan pada sektor industri TPT ini dibeli dari perusahaan yang khusus mengembangkan produk permesinan /peralatan tekstil. Semua industri TPT di Indonesia menggunakan mesin produksi luar negeri, tidak mengembangkan dan membuat mesin sendiri, kecuali PT Texmaco yang pernah mengembangkan mesin kain kasar.

Industri serat bersifat padat modal di samping banyak menggunakan tenaga kerja setengah terdidik. Industri ini mempunyai sifat produksi "teknologi proses". Industri benang bersifat padat modal di samping banyak menggunakan tenaga kerja. Umur ekonomi mesin penghasil benang relatif lebih panjang daripada umur ekonomis mesin pembuat tekstil kasar. Saat ini para industriawan lebih banyak menggunakan mesin penghasil benang lama karena kesulitan mendapatkan dana restrukturisasi.

Industri tekstil kasar merupakan sub-sektor industri TPT ketiga dari hulu, yaitu industri pembuat tekstil dengan bahan baku benang. Industri ini bersifat padat modal dan padat tenaga kerja karena diperlukan banyak mesin produksi di samping juga banyak menggunakan tenaga kerja setengah terdidik maupun tidak terdidik.

Umur ekonomi mesin tekstil kasar relatif lebih pendek daripada umur ekonomis mesin pembuat benang maupun mesin pembuat serat. Saat ini industri tekstil kasar masih banyak yang menggunakan mesin tekstil kasar lama. Belum menggunakan mesin benang baru (*shuttle-less loom*) karena kesulitan dana untuk restrukturisasi mesin. Bank umum nasional kurang percaya atas pengembalian kredit di sektor industri TPT nasional.

Industri garmen merupakan sub-sektor industri keempat dari hulu, yaitu industri pembuat pakaian jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen akhir. Industri ini bersifat padat tenaga kerja karena banyak menggunakan tenaga kerja yang pendidik-

an formalnya rendah. Diperlukan mesin-mesin yang relatif lebih murah daripada industri serat, benang, maupun tekstil. Umur ekonomi mesin-mesin industri garmen ini relatif lebih panjang daripada umur ekonomis mesin pembuat serat, benang, maupun tekstil. Sub-sektor ini bersifat padat tenaga kerja dan diperlukan modal kecil untuk bisa memulai usaha. Sehingga dalam masyarakat banyak dijumpai industri-industri kecil di bidang garmen baik skala menengah/ kecil maupun usaha mikro atau skala rumah tangga.

Prospek Pengembangan Industri TPT Nasional

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang mengakibatkan konsumsi dunia akan tekstil dan produk tekstil (TPT) terus bertambah, produk TPT Indonesia baru mampu meraih sekitar 2% pangsa ekspor dunia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menargetkan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang meningkat dari US\$. 8 milyar menjadi US \$.16. milyar atau dari 2% pangsa ekspor menjadi

4%, kira-kira menjadi dua kali lipat dari posisi sekarang. Untuk itu masing-masing sub-sektor ditargetkan menaikkan produksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.

Target beberapa sub-sub sektor industri TPT tersebut di atas hanya bisa tercapai apabila beberapa masalah yang dihadapi industri TPT bisa diatasi dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk iklim investasi yang kondusif hingga menarik investor, dalam arti : (1) kebijakan moneter, fiskal, energi, dan ketenagakerjaan lebih kondusif; (2) perbaikan prasarana umum; (3) Karena masih rendahnya investasi, pendanaan yang terbatas di sektor industri TPT dan tidak optimalnya fungsi-fungsi intermediasi perbankan, maka komitmen pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan sektor industri TPT. Misalnya membuat program jangka pendek di antaranya penundaan pemberlakuan upah minimum regional (UMR) hingga lima tahun mendatang. Beban biaya bisnis seperti kenaikan jaminan sosial tenaga

kerja perlu ditinjau lagi; (4) pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan barang-barang dari kawasan berikat untuk ekspor ulang juga perlu dibebaskan. PPN untuk produk TPT domestik diturunkan menjadi 5-0%, pemotongan pajak dan bunga perbankan ditekan di bawah 10%, penghapusan bea masuk bahan baku, dan lain-lain; (5) menghapus pungutan-pungutan baik resmi maupun tidak resmi, dan (6) pengurusan dokumen dan penanganan barang di pelabuhan dibuat lebih mudah dan cepat.

Posisi Industri TPT Nasional di Pasar Internasional

Bagi negara pengeksport produk TPT, tidak terkecuali Indonesia, sub-sektor industri garmen (pakaian jadi) merupakan tulang punggung produk ekspornya daripada sub sektor produk TPT lainnya. Sedangkan sub-sektor industri serat, benang, tekstil dan lain-lain yang bersifat lebih hulu, total nilai ekspornya lebih rendah daripada sub-sektor industri garmen. Sub-sektor ini berfungsi sebagai pemasok atau pendukung

industri garmen dan sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Industri garmen di Indonesia terdiri dari industri garmen besar, menengah, kecil, dan skala rumah tangga. Hasil produk industri garmen berskala besar dan menengah pada umumnya lebih banyak untuk pasar ekspor, sedangkan hasil produksi dari industri TPT berskala kecil dan skala rumah tangga pada umumnya untuk pasar dalam negeri.

Pangsa pasar ekspor produk TPT di pasar internasional Indonesia tahun 1996 Indonesia menempati posisi ke 10 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 6,8 milyar. Sementara pada tahun 2000 turun berada pada urutan ke 17 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 8,3 milyar. Tahun 2002 menduduki peringkat 10 dengan pangsa pasar sebesar 1,9% (Tabel 4).

Kontribusi industri TPT terhadap total ekspor cukup signifikan walaupun menurun dari tahun ke tahun. Kontribusi terhadap total ekspor sebesar 18,1 % atau 7.157 juta US\$ pada tahun 1999, meningkat menjadi sebesar 7.647 juta US\$

pada tahun 2004, tetapi persen kontribusinya terhadap total ekspor non migas menurun menjadi sebesar 13,68 % (Tabel 5).

Khusus produk sub-sektor industri garmen di pasar internasional, Indonesia menduduki peringkat 8 dengan pangsa pasar sebesar 2 %. Sedangkan perkembangan nilai ekspor produk TPT kuota dan bukan kuota tahun 2001 dibandingkan tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 6,73% dari US\$ 8,3 milyar menjadi US\$7,65 milyar. Untuk nilai ekspor produk TPT kuota menurun sebesar 3,72% dari US\$ 3,62 milyar menjadi US\$ 3,48 milyar dan nilai ekspor produk TPT bukan kuota menurun sebesar 9,23% dari US\$ 4,44 milyar menjadi US\$ 4,03 milyar.

Penurunan peringkat ekspor produk TPT Nasional di pasar internasional ini menunjukkan penurunan tingkat daya saing industri TPT nasional. Hal ini perlu dicermati bahwa Indonesia seharusnya tidak dapat mengharapkan pertumbuhan ekspor yang tinggi hanya dengan bertahan pada produk bernilai tambah yang rendah. Industri

TPT masih tetap dapat berkembang sejak dimulainya *Multi Fibre Arrangements (MFA)* yang sangat bergantung pada peningkatan kualitas produk, penurunan biaya pokok produk, kemampuan mendapatkan pasar-pasar baru dan penyerahan hasil produk tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Hal ini merupakan kunci peningkatan daya saing industri TPT Indonesia. *Multi Fibre Arrangements (MFA)* adalah kesepakatan antara negara berkembang pengekspor produk TPT dengan negara-negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Norwegia) pengimpor produk TPT dengan sistem kuota yang berlaku sejak sekitar tahun 1980.

Perkembangan selanjutnya dengan telah disepakatinya hasil putaran Uruguay pada Tanggal 15 April 1994 di Marrakesh dan kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, perjanjian perdagangan internasional produk TPT segera diimplementasikan bersamaan dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD). Prinsip utama dari isi perjanjian

perdagangan internasional produk TPT yang selama ini diatur dalam *MFA* yang memperkenankan adanya pembatasan impor melalui sistem kuota, akan diintegrasikan ke dalam aturan *GATT* dengan masa peralihan selama 10 tahun sejak tahun 1994. Dalam hal ini, Indonesia bersama negara-negara berkembang pengekspor produk TPT bergabung dalam kelompok organisasi *International Textile and Clothing Bureau (ITCB)*, memperjuangkan masa proses integrasi *Multi Fibre Arrangement (MFA)* ke dalam ketentuan *GATT/OPD* agar masa peralihan sistem kuota berakhir dalam waktu kurang dari 10 tahun terhitung sejak diberlakukannya Persetujuan Pembentukan *OPD*. Dengan demikian setelah masa peralihan perdagangan produk TPT dunia menjadi bebas dari sistem kuota.

Indonesia selama ini tidak pernah melakukan hambatan impor apapun terhadap komoditas TPT dan tetap melaksanakan komitmen untuk mengintegrasikan produk TPT dalam Persetujuan yang telah disepakati dalam putaran

Uruguay. Permasalahan yang mendapat perhatian Indonesia dalam masa transisi MFA ke dalam ketentuan GATT/OPD adalah mewaspadai ketentuan adanya penanggulangan tindakan "anti circumvention" yaitu upaya pengelakan oleh negara-negara maju pengimpor produk TPT terhadap kesepakatan persetujuan, dengan membuat ketentuan untuk memantau secara ketat ekspor TPT ke negara kuota maupun ke negara non kuota. Maksud pengawasan terhadap sikap negara-negara maju pengimpor produk TPT ini adalah bahwa pada akhir tahun ke 10 atau mulai 1 Januari 2005 ekspor produk TPT akan bebas aturan kuota. Dengan demikian negara-negara berkembang pengekspor produk TPT bisa bebas leluasa melakukan perdagangan internasional, tanpa pembatasan oleh negara-negara maju importir.

Di luar dugaan, usaha untuk menghapuskan kuota yang telah dirintis selama hampir 10 tahun yaitu menjelang tahap akhir penghapusan kuota, harapan negara-negara berkembang dan maju pengekspor produk TPT

menjadi sirna, karena di tahun-tahun terakhir pembebasan kuota ini bersamaan waktunya dengan masuknya Cina menjadi anggota OPD. Cina menjadi produsen TPT besar dan harga jualnya sangat murah. Sehingga negara-negara produsen TPT pesaing pemain lama banyak yang gulung tikar akibat kalah bersaing dengan produk TPT Cina. Diperkirakan tiga negara yaitu Cina, India dan Pakistan akan mendominasi pasar internasional.

Pada tahun 2002, pangsa pasar ekspor produk tekstil Cina di pasar internasional menduduki peringkat kedua dengan pangsa pasar sebesar 13,5% dan Pangsa pasar ekspor produk sub-sektor industri garmen di pasar internasional juga menduduki peringkat kedua dengan pangsa pasar sebesar 20,6 %. Bandingkan pangsa pasar ekspor produk tekstil dan garmen Indonesia yang hanya 1,9% dan 2%. Untuk total pakaian jadi di pasar Amerika misalnya, sampai dengan Juni 2004 Cina telah menguasai pasar pakaian sebesar 12,98% padahal sampai dengan tahun

2000 pangsa pasarnya baru mencapai 7,86%. Sementara untuk kategori yang telah dibebaskan kuotanya sejak 2002, Cina terus melaju dan merebut pangsa pasar negara lain secara signifikan. Angka ini masih terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh untuk kategori 239 (pakaian anak-anak) sebelum kuotanya dibebaskan, pangsa pasar Cina baru mencapai 6,97%. Akan tetapi setelah kuotanya dibebaskan langsung menggeser posisi dan merebut pangsa pasar negara lain dengan menguasai pasar 51,71% sampai dengan Juni 2004. Jenis produk ini sebelumnya menjadi unggulan beberapa negara di antaranya Thailand, Philipina dan Indonesia.

Meskipun permintaan produk industri TPT secara internasional terus meningkat, tetapi sejumlah negara pengekspor lama terus mengalami penurunan kinerja ekspornya. Diperkirakan tidak kurang dari 40% pabrik TPT di seluruh dunia akan gulung tikar atau paling tidak mengurangi produksinya yang diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) besar-besaran. Hal ini karena di samping monopoli Cina, saat ini juga terjadi inovasi mesin teknologi baru dengan kemampuan produksi ditingkatkan hingga beberapa kali lipat dan bersifat fleksible untuk variasi produksi sesuai permintaan pasar, berakibat memberi kontribusi terhadap terjadinya kelebihan produksi sekarang ini, belum dimiliki oleh industri TPT lama.

Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa dalam beberapa tahun terakhir investasi besar-besaran terus mengalir ke Cina. Saat ini negara tirai bambu ini menjadi importir mesin tekstil terbesar dunia dari berbagai jenis dan merek. Kapasitas produksinya telah mencapai lebih dari 60% dari total kapasitas produksi TPT dunia dengan kemampuan produksi berbagai jenis dan tingkatan mutu dengan harga murah. Kondisi ini akan terus menjadi ancaman bagi negara lain.

Tidak sedikit industri TPT di dunia saat ini resah sejak berakhirnya sistim kuota negara AS, Kanada dan Negara-negara uni Eropa. Banyak negara produ-

sen terus mengalami penurunan nilai ekspor diikuti dengan tutupnya pabrik sebagai dampak telah dibebaskannya kuota untuk beberapa jenis produk tekstil yang banyak diproduksi negara sedang berkembang, walaupun nilai total ekspor secara global terus naik dari tahun ke tahun. Mayoritas negara produsen termasuk Indonesia justru semakin mengkhawatirkan kemampuan daya saing industrinya dan menginginkan kuota diperpanjang dengan alasan belum siap. Alasan yang paling umum dari negara produsen adalah permesinan sudah tua dan perlu restrukturisasi. Sementara negara yang terus melakukan restrukturisasi mesin produksi dan efisiensi, juga masih belum yakin apakah yang dilakukan sudah cukup untuk menghadapi persaingan. Mayoritas berada dalam ketidakpastian. Dengan demikian pembebasan kuota yang semula sangat diharapkan kemudian berubah menjadi sesuatu yang dikhawatirkan.

Di beberapa negara, penghapusan kuota bukan hanya sekedar mengancam eksistensi industri pertekstilan, tetapi me-

nyangkut hidup matinya perekonomian negara itu. Kalau dampak pembebasan kuota bagi industri ini menyebabkan hilangnya pangsa pasar dan terjadinya PHK di banyak negara produsen, maka sistim kuota sebenarnya merupakan masa yang paling indah oleh banyak negara produsen dengan segala permasalahannya.

Di samping persaingan bebas yang akan memukul industri yang lemah dari negara lain, berakhirnya kuota TPT juga akan mengubah manajemen pembeli/importir dalam menyesuaikan pola perdagangan baru. Peritel/pembeli besar di negara maju meskipun terus meningkatkan volume pembelian dari tahun ke tahun, tetapi juga akan mengurangi jumlah supplier /eksportirnya demi efisiensi bisnis. Pengurangan jumlah supplier ini menyebabkan semakin sedikit perusahaan yang kebagian pesanan dan menyebabkan sebagian perusahaan terpaksa mengurangi produksinya atau bahkan gulung tikar. Hal ini disebabkan semasa berlakunya sistem kuota, pembeli/ importir di negara maju

suka atau tidak suka harus menempatkan pesanan ke banyak negara yang memiliki kuota. Dengan berakhirnya kuota, pola ini tidak menjadi keharusan lagi karena kebutuhan mereka sudah dapat dipenuhi oleh beberapa negara saja. Bukan hanya itu, sesama pembeli di dalam satu negara tidak harus mengumpulkan banyak pabrik yang memiliki kuota seperti pada masa sebelumnya tetapi cukup memilih beberapa saja yang memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan. Bentuk efisiensi pembeli semacam ini dalam upaya mengurangi biaya operasional dan menghemat waktu.

Hingga kini kebutuhan produk TPT dunia masih dilayani oleh lebih dari 150 negara produsen. Jumlah ini akan terus mengerucut dengan tidak adanya kuota. Diperkirakan sampai dengan 2010 jumlah supplier TPT dunia tinggal hanya berkisar 25 negara saja. Dilihat dari aspek pemerataan, kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan monopoli baru karena hanya memberikan kesempatan kepada sebagian kecil negara

pengekspor yang mempunyai daya saing lebih tinggi, akan berakibat mengancam banyak negara lain yang bahkan sangat tergantung kepada industri pertekstilannya.

Disinilah tantangan berat dan sekaligus peluang industri TPT suatu negara termasuk Indonesia. Negara yang berhasil masuk dalam daftar pembeli sebenarnya memperoleh peluang yang sangat besar karena akan terjadi pengalihan pesanan limpahan dari negara lain. Tentu saja dengan persyaratan kemajuan dan inovasi mesin tekstil modern yang memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan produksi lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat ini, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat memenangkan peluang dimaksud. Diharapkan Indonesia masih tetap menjadi supplier TPT dunia setidaknya menjadi tuan rumah di negara sendiri karena kebutuhan di dalam negeripun terus tumbuh. Untuk itu perlu peningkatan daya saing baik dari segi harga, mutu dan tepat waktu penyerahan,

terhadap produk dari negara pesaing.

Dengan berakhirnya sistem kuota ekspor dan penguasaan pasar produk TPT dari Cina, bukan hanya menjadi kekhawatiran produsen negara sedang berkembang yang lebih mengandalkan ekspornya ke negara maju, tetapi juga negara maju yang mengekspor produk TPT. Industriawan di Amerika dan Eropa, yang selama ini lebih dikenal sebagai negara tujuan ekspor TPT, melalui asosiasi pertekstilan terus berupaya untuk memperpanjang batas akhir pembebasan kuota. Sejumlah asosiasi yang mewakili industri TPT Amerika dan Eropa sangat bersemangat dan antusias mengajak negara produsen lain untuk meminta perpanjangan kuota melalui Deklarasi Istanbul. Deklarasi ini pada intinya meminta OPD segera mengadakan pertemuan khusus untuk menunda masa berakhirnya kuota hingga 31 Desember 2007 demi menyelamatkan puluhan juta pekerja di sektor industri TPT, termasuk menghindari adanya monopoli baru. Sampai dengan awal

September 2004 sudah ada 125 asosiasi tekstil dari 59 negara yang menandatangani deklarasi ini termasuk beberapa negara dari Asia seperti Bangladesh (*The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry*), Philipina (*Confederation of Garmens Eksporters of the Philippines*), Sri Lanka (*National Apparel Eksporters Association*) dan Indonesia (Asosiasi Pertekstilan Indonesia - API). Usaha ini diharapkan mampu mengubah kebijakan negara Uni Eropa, As dan Kanada.

Analisis Hambatan Industri Tekstil Nasional

Akibat dari krisis ekonomi 1997, munculnya pendatang baru industri TPT Cina yang mulai menguasai pasar di pasar internasional, kenaikan harga BBM yang rata-rata mencapai 100% Oktober 2005, dan tidak adanya dukungan dari pemerintah terhadap permasalahan sektor riil khususnya industri TPT secara nasional, industri TPT nasional saat ini banyak melakukan PHK. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gulung

tikar. Apabila pemerintah dan perbankan nasional tidak mengubah arah kebijakan atau tidak ada kemauan politik untuk mengembangkan daya saing nasional, maka hal ini merupakan kesalahan besar, karena apabila industri TPT nasional dibiarkan runtuh, maka jumlah pengangguran dalam masyarakat akan bertambah dan sumber devisa nasional akan menjadi turun.

Hambatan Internal Industri

Hampir seluruh sub sektor industri TPT nasional saat ini belum ada yang mengembangkan pembuatan mesin produksi sendiri, dari mulai sub sektor industri serat hingga sub sektor garmen. Industri TPT di Indonesia menggunakan seluruh mesin produksinya buatan luar negeri. Di samping penggunaan mesin produksi dari luar negeri, bahan baku dan bahan penolongnya pun hampir 90% berasal dari impor luar negeri. Meskipun demikian, karena pengalaman historis para pengusaha di bidang industri TPT dan ketrampilan tenaga kerja yang hingga tahun 1997

lalu termasuk murah dan tidak banyak gejolak di bidang ketenagakerjaan, industri TPT ini mampu bertahan di Indonesia. Dengan demikian keberadaan industri ini sangat strategis, dalam arti saling memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun industri-awan itu sendiri.

Akibat krisis ekonomi tahun 1997, kenaikan bahan bakar minyak 2005, dan sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada sektor riil, dan masuknya negara Cina ke dalam OPD di mana industri TPT Cina dengan mesin produksi baru, maka seharusnya Pemerintah RI membantu industri TPT nasional untuk merestrukturisasi mesin produksinya agar mampu bersaing dengan produk dari Cina, di samping kebijakan sektor lain sebagai persyaratan untuk meningkatkan daya saing nasional industri TPT.

Saat ini, kondisi mesin produksi industri TPT nasional pada umumnya sangat menyedihkan karena seharusnya diperlukan restrukturisasi, tetapi tidak ada dana bantuan kredit dari bank umum nasional. Demikian

juga kondisi industri tekstil kasar di Indonesia. Sub sektor industri tekstil kasar kondisinya lebih berat daripada sub sektor industri TPT lainnya karena umur ekonomis mesin produksi tekstil kasar lebih pendek. Apabila tidak cepat direstrukturisasi biaya produksinya lebih tinggi daripada mesin produksi yang telah diperbarui, sehingga daya saingnya akan lebih rendah.

Hambatan Eksternal (Dalam Negeri) :

Hambatan eksternal (dalam negeri) adalah hambatan yang terjadi di luar industri tetapi masih dalam lingkup hambatan dan kondisi dalam negeri. Adapun hambatan eksternal (dalam negeri) yang sangat menonjol antara lain adalah :

(1) Kebijakan pemerintah yang kurang kondusif dan tidak memperhatikan dampak negatif terhadap kemampuan daya saing industri nasional terhadap persaingan pasar internasional seperti kebijakan keuangan, energi, ketenagakerjaan, dan otonomi daerah (misalnya: Undang-

Undang perpajakan, Undang-Undang Perburuhan, kebijakan UMP /UMK, kebijakan moneter, pungutan liar yang tidak serius diberantas oleh Pemerintah, dan lain-lain).

(2) Rendahnya investasi di sektor industri TPT karena Bank Indonesia sebagai bank sentral kurang mendukung pengembangan industri TPT sehingga bank umum nasional tidak berminat memberikan kredit restrukturisasi industri TPT. Di samping itu juga tidak optimalnya fungsi intermediasi perbankan (suku bunga bank yang tinggi, kurs ekspor yang tidak kompetitif, dan lain-lain), sehingga industri TPT menghadapi hambatan misalnya dalam peremajaan mesin produksi.

(3) Maraknya barang impor produk TPT dari Cina bahkan sebagian penyelundupan produk TPT dari Cina juga yang harganya sangat rendah bila dibandingkan dengan harga jual produk TPT dalam negeri, sehingga pangsa pasar produk TPT

dalam negeri menjadi turun. Hal ini bisa berakibat pengurangan tenaga kerja bahkan gulung tikar.

(4) Infrastruktur yang minim dan mahal seperti sistem transportasi yang semakin macet, sistem pelabuhan dan kepabeanan, ekspedisi dan biaya telekomunikasi yang tinggi.

(5) Besarnya biaya energi yang disebabkan oleh tingginya biaya tarif dasar listrik (TDL), kenaikan BBM, batubara, gas industri yang pada akhirnya menaikkan struktur biaya produksi ;

Hambatan Daya Saing Pasar Internasional

Permasalahan daya saing pasar internasional yang dimaksud adalah permasalahan yang terjadi di luar industri dalam kaitannya dengan kemampuan daya saing industri TPT nasional terhadap industri TPT luar negeri dalam memenangkan persaingan di pasar internasional. Adapun permasalahan daya saing pasar internasional yang sangat

menonjol antara lain sebagai berikut.:

- (1) Penghapusan sistem kuota mengakibatkan kehilangan pasar ekspor bagi industri TPT nasional yang tidak efisien (tercermin dalam struktur biaya pokok tinggi), kualitas hasil produksinya rendah, dan tidak bisa mengirimkan ke tujuan importir tepat waktu (meskipun tidak tepat waktu itu tidak semata-mata akibat internal industri yang bersangkutan).
- (2) Dalam era perdagangan bebas dengan berlakunya OPD/AFTA, dan bertambahnya FTA dan RTA, mengakibatkan bertambahnya pesaing produk TPT di pasar ekspor ;
- (3) Meningkatnya dominasi produk TPT dari Cina, India dan Pakistan karena dukungan pemerintahnya masing-masing, di samping situasi dalam negerinya sangat kondusif untuk investasi, lokasi geografis yang menguntungkan untuk pasar Uni Eropa dan AS; menjadikan produk TPT

nasional kalah bersaing. Dampak ini semakin terasa pada industri kecil/menengah yang berorientasi pasar ekspor yang dikelola tidak secara professional.

- (4) Terjadinya penurunan harga secara umum per unit produk TPT di pasar internasional rata-rata sekitar 15% sejak lima tahun terakhir ini dan akan menurun lagi menjadi sekitar 20% pasca kuota, mengakibatkan industri TPT nasional yang kebanyakan tidak efisien menjadi kalah bersaing. Bila 10 tahun yang lalu seorang produsen dalam memproduksi jenis produk tertentu dengan biaya pokok tertentu dan ingin mendapatkan laba tertentu dapat menjual dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pengusaha yang bersangkutan, maka saat ini masalahnya di pasar harga jual suatu jenis produk TPT tertentu sudah ditentukan. Masalahnya tinggal pengusaha yang bersangkutan bisa atau tidak memproduksi barang tersebut dengan biaya

pokok lebih rendah daripada harga jual di pasar yang sudah ditentukan.

- (5) Secara geografis, jarak antara Indonesia dengan negara utama pengimpor produk TPT lebih jauh daripada negara Cina, India dan Vietnam. Konsekuensinya biaya angkut lebih mahal, dan berakibat mengurangi kemampuan daya saing di pasar internasional.

Peranan Industri Tpt Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah

Telah dikemukakan bahwa salah satu masalah nasional yang harus segera diatasi bangsa Indonesia saat ini adalah jumlah pengangguran yang semakin bertambah dalam masyarakat yaitu mencapai 40 juta pengangguran, terdiri dari 10 juta pengangguran terbuka dan 30 juta pengangguran tidak kentara (Rangkuman Pertemuan Presiden dengan menteri-menterinya Tanggal 2 Juli 2006). Dampak dari pengangguran yang berkepanjangan adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin, karena dengan peng-

anggaran akan menggunakan sisa kekayaannya untuk biaya hidup, sehingga lama kelamaan akan menjadi miskin. Dengan demikian jumlah penduduk miskin berdasarkan "Rangkuman Pertemuan Presiden dengan Para Menteri dalam Rancangan Cetak Biru Upaya Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati 2006 - 2010 di Losari Magelang 2 Juli 2006" jumlah penduduk miskin \pm 60.000 juta jiwa, terdiri dari miskin mutlak 40 juta jiwa dan mendekati miskin 20 juta jiwa.

Produk TPT yang meliputi produk serat, kain tekstil, pakaian jadi dan produk tekstil lainnya merupakan produk andalan bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi sebagai penyumbang devisa terbesar dari ekspor non migas dan membantu mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja dalam masyarakat. Dengan tetap mempertahankan eksistensi sebagai industri padat karya, industri TPT terbukti memberikan peluang untuk tumbuhnya industri lain di sekitar lokasi industri TPT.

Jumlah industri TPT menengah ke atas yang merupakan sektor formal hingga tahun 2004 dan menjadi anggota API sebanyak 2.654 perusahaan dengan total investasi kumulatif sebesar Rp.132,- triliun di luar industri TPT kecil dan mikro berskala rumah tangga yang bersifat informal terutama pada sub-sektor garmen dan sub-sektor perdagangan TPT. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri TPT menengah dan besar yang menjadi anggota API ini hingga pada tahun 2003 berjumlah 1.182.870 orang, tidak termasuk penyerapan tenaga kerja industri TPT yang tidak masuk dalam anggota API dan sub-sektor garmen atau konveksi berskala kecil dan skala rumah tangga yang bersifat informal dan sulit untuk didata (API, 2004). Apabila rata-rata setiap tenaga kerja tanggungan 4 orang saja, maka jumlah penduduk yang hidup dari sektor industri TPT yang tercatat oleh API ini minimal 6 juta orang, belum termasuk UKMK/IKMK TPT dan mikro skala rumah tangga dan pedagang pakaian di pasar

tradisional atau pusat perbelanjaan di perkotaan.

Dalam suatu daerah yang didirikan industri TPT atau industri apa saja yang menyerap banyak tenaga kerja, maka di sekitar pabrik akan timbul usaha baru, misalnya usaha warung makan, toko kelontong, bengkel motor, rumah kost atau kontrakan, dan jasa lainnya. Bahkan bila dalam suatu wilayah tertentu menjadi kawasan industri atau pabrik, maka bank umum akan membuka cabang di daerah tersebut. Fenomena ini akan membawa dampak positif bagi kegiatan ekonomi daerah, yang akan bergulir seperti bola salju, makin berputar makin besar volume, nilai dan jumlah orang yang hidup dari kegiatan ekonomi tersebut.

Sebaran industri TPT yang terbanyak adalah di wilayah Bandung dan sekitarnya mencapai jumlah sekitar 60%, di antaranya yang tercatat dalam anggota API 181 perusahaan. Kedua, di wilayah Propinsi Jawa Tengah (yang tercatat dalam anggota API 166 perusahaan), ketiga di wilayah Propinsi Jawa

Timur (yang tercatat dalam anggota API 16 perusahaan).

API telah menargetkan jumlah ekspor produk TPT menjadi dua kali lipat tahun 2004 hingga tahun 2010 yaitu dari nilai ekspor US.D.7,64 milyar menjadi US.D.15,28 milyar, dengan total investasi sebesar US \$.7,65 atau Rp.64,97 triliun, dapat menampung tenaga kerja baru sekitar 309.000 jiwa (API, 2004). Target hanya bisa tercapai apabila pemerintah mempunyai kemauan politik untuk mendukung, dengan memperbaiki iklim investasi, dan lembaga perbankan memberikan bantuan kredit investasi kepada industri TPT nasional Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Industri TPT merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang mampu memberikan perolehan devisa terbesar dari ekspor di luar produk non migas.
2. Industri TPT sangat bermanfaat bagi sumber pembiayaan untuk kelangsungan pengembangan perekonomian negara berkembang seperti

Indonesia, dan masih merupakan industri yang perlu mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, mengingat jenis industri ini pada umumnya masih bersifat padat karya yang mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah cukup banyak.

3. Akar permasalahan yang dihadapi oleh industri TPT secara nasional saat ini adalah
 - a. Masalah internal perusahaan, yaitu perlunya restrukturisasi mesin produksi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi dan kualitas hasil produksi, tetapi terkendala dana.
 - b. Masalah eksternal perusahaan, yaitu (1) sikap perbankan nasional yang tidak mempercayai industri TPT karena dianggap beresiko tinggi; (2) penyelundupan produk TPT yang berakibat produk TPT domestik tidak dapat bersaing di pasar domestik; (3) infrastruktur (transportasi, listrik, air, telepon, pelabuhan) sangat terbatas dan mahal; (4) masalah bea masuk dan prosedur eks-

por memerlukan waktu lebih lama, berakibat memberatkan industri TPT Nasional; (5) pungutan pajak Pemerintah Pusat dan Pemda sangat tinggi; (6) pungutan liar dan alasan keamanan memberatkan pengusaha; (7) aspek perburuhan yaitu undang-undang perburuhan, upah minimum regional, dan kualitas/produktivitas buruh yang sangat rendah, sangat memberatkan pengusaha pada saat situasi seperti ini; (8) arah kebijakan regulasi dan kemauan politik dari pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri TPT tidak jelas.

4. Permasalahan yang menjadi tantangan berat saat ini adalah membanjirnya produk tekstil dari Cina di pasar internasional dan pasar domestik dengan harga yang sangat murah, bahkan bisa lebih rendah 50% dari harga produk domestik.
5. Pemberlakuan sistem kuota ekspor produk tekstil negara Amerika Serikat, Uni Eropa

dan Kanada berakhir pada awal tahun 2005 yang lalu. Akibat dari penghapusan kuota ini akan terjadi persaingan yang ketat dengan industri TPT dari negara Cina, India, Pakistan dan lain-lain. Bagi industri TPT nasional yang memproduksi tidak efisien, biaya pokok produksi tinggi, dan tidak tepat waktu penyerahan, secara alami akan kalah bersaing dengan produk TPT dari negara pesaingnya.

Implikasi Kebijakan

Untuk menjaga kelangsungan industri TPT sebagai komoditas yang mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat diperlukan berbagai kebijakan perdagangan luar negeri dalam menghadapi pasar global. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memicu kelancaran penetrasi pengembangan dan sekaligus peningkatan akses di pasar internasional dan domestik dalam menghadapi persaingan internasional yang semakin tajam di saat mendatang. Kebijakan yang diperlukan dibagi

dalam dua fase yaitu jangka pendek dan jangka panjang, yaitu.:

A. Jangka pendek :

1. Penundaan pemberlakuan upah minimum regional (UMR), paling tidak untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
2. Beban biaya bisnis seperti jaminan sosial pekerja dibatalkan (misalnya : Jamsostek untuk pekerja asing, Jamsosnas) atau diserahkan kepada perusahaan untuk memilih jasa asuransi masing-masing.
3. UU ketenagakerjaan ditinjau kembali melalui Kepmen /Perpu khususnya yang berkaitan dengan pemberian pesangon, PHK, pengupahan, perselisihan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
4. PPN impor dan barang untuk ekspor ulang perlu dihapuskan.
5. PPN untuk kebutuhan produk TPT dalam negeri, ekspor, pembelian bahan baku, diturunkan menjadi 0%.
6. Pajak :

a. "Haircut" (dalam pola restrukturisasi hutang)

a. *Revaluasi aset* dalam rangka restrukturisasi dibayar dengan 0%.

7. *Tax holiday* bagi investasi TPT dalam dan luar negeri perlu dihidupkan kembali.
8. Bunga perbankan domestik diturunkan menjadi dibawah 10%.
9. Menentukan nilai kurs ekspor yang kompetitif, contohnya saat ini Rp.9.300,- per US\$, kemudian untuk hasil negosiasi L/C dari produk TPT ditetapkan 10% di atas kurs yang berlaku.
10. Memberlakukan produk industri padat karya, seperti industri TPT menjadi produk strategis.
11. Penggunaan dan perlindungan terhadap produk dalam negeri.
12. Penyederhanaan prosedur ekspor dan pengurangan paper works.

B. Jangka menengah dan panjang :

1. Meninjau kembali UU tenaga kerja agar menjadi bisnis dan investasi yang

bersahabat, (antara lain yang masih menampung elemen Kepmen 150) dengan kompensasi yang tinggi bagi pekerja yang akan meninggalkan/pensiun dari perusahaan.

2. Menjamin kondisi nilai tukar yang kompetitif dan suku bunga perbankan yang tidak berbeda jauh dengan suku bunga pinjaman internasional.
3. Prioritaskan penyelesaian restrukturisasi utang di sektor industri TPT nasional, dan jika diperlukan, pengucuran dana pemerintah untuk mendukung peningkatan produktifitas peralatan/mesin.
4. Mendorong kalangan perbankan nasional untuk mendukung pembiayaan industri TPT nasional.
5. Meningkatkan potensi ekspor industri TPT nasional di pasar internasional. Untuk hal ini industri TPT memerlukan peningkatan rantai nilai tambah, mengembangkan institusi *fashion* untuk menghasilkan potensi SDM, khususnya di bidang

manajemen, penjualan, desain dan *fashion* di bidang tekstil dan garmen, demikian pula peningkatan kegiatan promosi.

6. Melakukan persiapan menghadapi penghapusan tarif dan yang bukan tarif, dan melancarkan sosialisasi perdagangan antar negara ASEAN, FTA's dan RTA's dan aturan OPD, untuk menghadapi kendala bukan yang diberlakukan oleh negara pengimpor.
7. Untuk memacu pertumbuhan sektor riil, sangat dibutuhkan kebijakan untuk menciptakan kondisi hubungan industrial ketenagakerjaan yang baik, iklim investasi dan bisnis yang kondusif, dan infrastruktur yang memadai.
8. Perbaiki situasi keamanan, ketertiban umum dan kepastian hukum untuk menarik minat investasi langsung dari luar negeri.
9. Peninjauan beberapa bidang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, agar sektor riil mempunyai daya saing tinggi dan iklim inves-

tasi kondusif, misalnya: bidang pelabuhan dan kepabeanan, bidang perpajakan, bidang ketenagakerjaan, bidang perbankan dan pembiayaan, bidang energi (listrik dan bahan bakar), dan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baari La Inggi, 2004. *Reaksi Menjelang Berakhirnya Kuota TPT*, <http://textile.web.id/article> (19 Januari 2007).
- Sunjoto Tanudjaja, 2004. *Indonesia dan Perdagangan TPT* Makalah dalam seminar Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru, Jakarta, 5 Agustus 1989. *Rangkuman Pertemuan Presiden dengan Para Menteri*, 2 Juli 2006. "Rancangan Cetak Biru Upaya Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Pengembangan Bahan Bakar Nabati 2006-2010", Magelang

V. Winarto, 2000, *Kewirausahaan dalam Rangka Penerapan IPTEK*, pada seminar Industri Kecil William T. Jame, Nopem-

ber 2004. ' Prospek Ekspor Sandang dan Tekstil Negara Asia Pasifik Pasca Penghapusan Kuota', *Indonesia Textile Maga-*

zine, Jakarta, 4-17.dan Menengah", Lembaga Manajemen PPM, Jakarta

Lampiran

Tabel 1. *Produksi Industri TPT Nasional (ton)*

No.	Komoditas	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Serat	839.566	970.749	961.041	777.395	776.200	796.329
2.	Benang	1.912.485	2.056.303	2.025.458	1.649.445	1.646.911	1.692.201
3.	Fabrics	1.346.236	1.546.360	1.561.824	1.275.485	1.273.525	1.312.106
4.	Garmen	543.150	554.436	565.524	462.343	461.632	516.987
5.	Produk tekstil lainnya	22.534	42.152	42.995	35.339	35.284	43.671
	Total	4.663.971	5.170.000	5.156.842	4.193.552	4.193.552	4.361.294

Sumber : BPS

Tabel 2 : *Ekspor TPT Indonesia 1995-2003 (Dalam US.D. Miliar)*

Sektor Industri	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TPT	6,06	6,43	7,32	7,32	7,16	8,20	7,65	6,89	7,03	7,64
Migas	10,46	11,72	11,62	7,87	9,79	14,37	12,64	12,11	13,64	
Non Migas	34,95	38,09	41,82	40,98	38,87	47,76	43,68	45,05	47,39	55,90
Jumlah Migas & Non Migas	45,42	49,81	53,44	48,85	48,67	62,12	56,32	57,16	61,03	

Sumber : BPS, Disperindag, API.

Tabel 3. : Program Pengembangan Produksi Industri TPT hingga tahun 2010

Sub Sektor	Target Produksi per tahun		Alat Tambahan produksi	Diperlukan investasi (US. \$)	Tenaga kerja yang terserap
	Saat ini	Menjadi			
Industri serat	1,2 juta ton	1,76 juta ton	18 unit pabrik serat sintetik 2 unit pabrik serat rayon.	0,75 milyar	20.000 orang
Industri benang	2,3 juta ton benang	3,1 juta ton benang	Restrukturisasi 2,5 juta spindle da penambahan 2,4 juta spindle	300 juta 960 juta	72.000 orang
Industri tekstil kasar dan knitting	800 ribu ton	2,4 juta ton	Restrukturisasi 200 ribu shuttle loom menjadi shuttle less loom Tambahkan mesin tekstil kasar shuttle less loom 63 542 loom dan 16.688 mesin knitting.	2,27 milyar	Tidak ada data
Industri garmen jadi	1,5 juta ton	2,471 juta ton	700 ribu mesin finishing	0,19 milyar	Tidak ada data
Industri garmen	590 ton	670 juta ton	-	0,22 milyar	217 ribu orang

Sumber: API.

Tabel 4. : Negara Eksportir tekstil dunia Tahun 2002

No.	Negara	% ekspor	No.	Negara	% ekspor
1	Uni Eropa	34,2 %	9	Turki	2,8 %
2	Cina	13,5 %	10	Indonesia	1,9 %
3	Amerika Serikat	7 %	11	Mexico	1,5 %
4	Korea Selatan	7 %	12	Kanada	1,4 %
5	Taiwan	6,3 %	13	Thailand	1,3 %
6	Jepang	4 %	14	Swis	0,9 %
7	India	3,7 %	15	Hongkong	0,6 %
8	Pakistan	3,1 %	16	Negara2 lainnya	10,8 %

Sumber : Deperindag & API

Tabel 5. Kontribusi Industri TPT

No.	Tahun	Ekspor Tekstil (Juta US\$)	Ekspor Non Migas (Juta US\$)	Kontribusi (%)
1	1999	7.157	39.510	18,1
2	2000	8.205	47.757	17,2
3	2001	7.676	43.685	17,6
4	2002	6.888	45.046	15,29
5	2003	7.033	47.400	14,84
6	2004	7.647	55.900	13,68

Sumber : BPS